

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Corporate Governance (CG) telah menjadi sebuah isu yang menarik untuk disimak (Sayidah, 2007). Secara teoritis, CG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan (Surya & Yustivandana, 2006). Dengan diterapkannya CG yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan (Tjager, Alijoyo, Djemat, & Soembodo, 2003).

Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menerapkan *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara konsisten (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MBU/2002 Pasal 2 ayat 1). Hal ini terkait dengan keberadaan BUMN sebagai penggerak perekonomian Indonesia dan sekaligus menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tjager, *et al.* 2003:186). Sebelum pelaksanaan GCG, fungsi BUMN sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ternyata tidak dapat dijalankan mengingat adanya praktik *mark-up* yang terjadi di lingkungannya. Praktik *mark-up* ini yang menyebabkan tingginya biaya operasi BUMN sehingga memunculkan kerugian BUMN. Hal ini berdampak pada

terjadinya ketidaksesuaian mengenai harga yang dibayarkan masyarakat dengan produk/jasa yang diterima masyarakat (Tjager, *et al.*, 2003:187).

Secara teoretis, keberhasilan penerapan GCG akan berdampak pada kinerja perusahaan yang melakukannya (Heriyanto & Mas'ud, 2013) dan penerapan ini tidak lepas dari peran dewan komisaris sebagai pengawas dimana isu kredibilitasnya tercermin pada jumlahnya, selain pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya (Syakhroza, 2004) maupun independensinya (Wulandari, 2006).

Dewan komisaris ini bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasehat pada direksi jika dipandang perlu (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 9 ayat 2). Hasil penelitian terdahulu yang menyoroti pengaruh ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris ternyata masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil.

- a. Hasil penelitian Natalylova (2013) , El-Charani (2014), maupun Terius & Christiawan (2015) menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan hasil penelitian Heriyanto & Mas'ud (2016) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- b. Hasil penelitian Manik (2011) dan El-Charani (2014) mendokumentasikan independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Karim (2010) maupun Terius & Christiawan (2015) menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan keempat hasil penelitian tersebut,

Wulandari (2006) mendokumentasikan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Secara teoritis juga, keberhasilan penerapan GCG tidak lepas dari bentuk struktur kepemilikan perusahaan (Wicaksono, 2000 dalam Utama & Afriani, 2005). Dalam konteks pemantuan kinerja BUMN di pasar modal, investor publik merupakan satu-satunya kelompok investor yang dapat melakukannya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap pengaruh kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan ternyata masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalylova (2013) maupun Indrasti & Martini (2014) menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Meski demikian, Siahaan (2013) mendokumentasikan struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai keberadaan pengaruh kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian pada BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka memodifikasi model penelitian yang sudah ada, maka kinerja perusahaan pada periode sebelumnya ditambahkan dalam model penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada model penelitian Stierwald (2010) maupun Schmidt (2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kinerja perusahaan pada periode sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kinerja perusahaan pada periode sebelumnya terhadap kinerja perusahaan saat ini?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademik.

Hasil penelitian dapat diharapkan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian yang sudah ada seputar pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, struktur kepemilikan publik dan kinerja perusahaan sebelumnya terhadap kinerja perusahaan.

2. Manfaat praktis. Perusahaan dapat melihat seberapa efektif keberadaan jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan publik terhadap kinerja yang dihasilkannya. Dengan terlihat adanya pengaruh ketiga hal tersebut dalam penelitian ini, maka perusahaan dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat berkaitan dengan *good corporate governance*.

